



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. HM. Rafi'i No. 3 Telpn (0532) 21052 Fax. (0532) 29002

PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH

Website : bappedakotawaringinbaratkab.go.id, E-mail : bappedakabkobar@yahoo.co.id

NOTULEN RAPAT

Judul Rapat : **RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN KABUPATEN
KOBAR SEHAT (KKS) TAHUN 2021**

Hari / Tanggal : Rabu, 06 Januari 2021

Waktu Rapat : Pukul 08.00 - 12.00 WIB

Tempat : Aula Lantai II Kantor Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Jalan
H.M.Rafi'i Nomor 3 Pangkalan Bun.

Pimpinan Rapat : Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat

Peserta Rapat : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Kotawaringin Barat
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten
Kotawaringin Barat
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kotawaringin Barat
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Kotawaringin Barat
10. Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat
(Daftar Hadir Terlampir)

Kegiatan Rapat : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Kobar Sehat (KKS)
Tahun 2021

I. PEMBUKAAN

Pembukaan dari Kepala Bappeda Kobar

- Tahun 2019 Kobar mendapat penghargaan Swasti Saba untuk kota sehat kategori Padapa dari Kemendagri dan Kemenkes
- Setiap 2 tahun sekali, pelaksanaan kota sehat akan dinilai kembali oleh Kementerian Kesehatan dan Kemendagri
- 2021 Pemerintah Kobar sudah berkomitmen untuk bisa mengikuti Kabupaten Kota Sehat.
- Terkait dengan persiapan untuk mengikuti kota sehat ini, harapan kita semua perangkat daerah yang terlibat langsung harus segera merealisasikan indikator-indikator yang menjadi penilaian dalam kota sehat ini.
- Biasanya pengumuman kota sehat ini, dilaksanakan pada bulan November bertepatan dengan Kesehatan Nasional
- Untuk memperoleh predikat kota sehat ini banyak aspek regulasi yang terjadi perubahan.
- Dulu kita masih mengacu pada Peraturan Kemendagri dan Kemenkes. Tapi sekarang mengacu pada Pepres.
- Ada 4 persyaratan tatanan wajib yang harus dipenuhi untuk bisa mengikuti program Kabupaten/Kota Sehat, yaitu :
 1. Pemukiman, Sarana dan Prasarana Sehat
 2. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi
 3. Pasar
 4. Pendidikan
- Selanjutnya, ada juga tatanan pilihan yaitu tatanan yang diselenggarakan setelah tatanan wajib terpenuhi untuk mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Sehat yang lebih tinggi. Pilihan tatanan tersebut meliputi :
 1. Kehidupan Sosial yang Sehat dan Penanganan Bencana
 2. Transportasi dan Tata Tertib Lalu Lintas Jalan
 3. Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM
 4. Pariwisata
 5. Rumah Ibadah
 6. Kota Pintar (Smart City)
- Tahun 2020, diakhir kita sudah sepakat bahwa tatanan yang kita pilih dalam mengikuti kabupaten kota sehat tahun 2021 ini adalah tatanan pariwisata.

Kabid Sospem Bappeda

- Tahun 2019 kita mendapatkan Padapa, kita menggunakan regulasi SKP 2 Menteri yang mana indikator dan tatanannya berbeda dengan Pepres

- Tahun 2019 hanya ada 2 tatanan yang wajib yaitu Tatanan Permukiman Sarana Prasarana Sehat dan tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri.
- Kita menyepakati 2 pilihan yaitu tambahannya pariwisata dan ketahanan pangan dan gizi
- Kemendagri mengeluarkan regulasi melalui webinar secara langsung seluruh Indonesia
- Perbedaan SKP 2 Menteri dengan Perpres yaitu di Perpres ini ada 4 tatanan wajib
- Sesuai dengan informasi terakhir, waktu padapa tahun 2019, tim verifikasi dari pusat pasar dan pendidikan kita sudah siap. Mungkin di tingkat pendidikan tim sudah melaksanakan peninjauan dilapangan.
- Melakukan pemenuhan indikator-indikator yang ada

II. DISKUSI/TANYA JAWAB

Kabid Sospem Bappeda

- Tatanan Permukiman Sarana dan Prasarana Sehat (diampu oleh PUPR, DLH, PERKIM)
- Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi (diampu oleh DINKES, KETAHANAN PANGAN)
- Tatanan Pasar ada 1 dimensi dan 11 aspek/kriteria (diampu oleh DISPERINDAGKOP UKM)
- Tatanan Pendidikan ada 10 dimensi (diampu oleh DIKBUD)
- SKPD bisa menyiapkan data dukung yang diperlukan untuk memenuhi di tahun 2021, sehingga apabila memang ada kesulitan atau masalah bisa kita selesaikan dalam rangka koordinasi lebih lanjut

Kepala Bappeda

- Bulan depan akan dievaluasi kriteria mana yang belum bisa dipenuhi dan ditindaklanjuti
- Semua tatanan dan kriteria harus dipenuhi
- Yang memang terkait langsung dengan Kabupaten Kota Sehat supaya dijadikan sebagai prioritas untuk proses pelaksanaan kegiatannya
- Mekanisme kota sehat ini adalah SKPD yang ada di aparaturnya pemerintah termasuk dalam tim Pembina dan yang banyak bekerja di lapangan adalah forum
- Pelaksanaan kegiatan KKS ini, kita harapkan 6 kecamatan ini menjadi fokus kita mengikuti Kabupaten Kota Sehat.

Kepala Dinas Pariwisata

- Perlu koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain
- Implementasi secara keseluruhan, kemudian ada objeknya, survei kemudian penilaian
- Menentukan destinasi dan mempersiapkan destinasi tersebut
- Jika tidak ada lokus yang ditentukan itu bisa sangat bias karena destinasi kita ini cukup banyak
- Aspek pelayanan kesehatan sudah memenuhi kebutuhan orang asing

Kepala Bappeda

- Objek wisata yang besar seperti Tanjung Puting dan Pantai Kubu menjadi fokus kita, sambil melihat perkembangan regulasi
- Pariwisata kita pilih, karena menjadi prioritas dalam RPJMD kita.

Disperindagkop UKM

- Untuk kelengkapan data dukung kita koordinasi kembali mengenai 11 indikator yang akan dipenuhi
- Untuk tim Pembina kota sehat yang kami tahu adalah pokjanya
- Terkait dengan suplay daging dari rumah potong hewan (RPH), kami akan koordinasi dengan Dinas Peternakan
- Terkait dengan Car Free Day, ada 3 SKPD yang selama ini terlibat secara langsung, yaitu DLH, Dinas Perhubungan dan Disperindagkop UKM. Namun sampai saat ini kami belum tahu apakah CFD ini pernah ada SK siapa yang menjadi leading sektornya.
- Secara umum yang kita ketahui CFD ini identik dengan peran UKM nya. Padahal tujuan CFD adalah masalah lingkungan hidup
- CFD perlu di SK-an supaya lebih jelas, agar masing-masing OPD ini memiliki tanggung jawabnya masing-masing.

PUPR

- Kami siap mendukung di tatanan permukiman sarana dan prasarana sehat
- Kami akan mengkoordinasikan mengenai keberadaan dewan sumber daya air
- Kami akan mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung terkait keterlibatan masyarakat
- ODF 2 kecamatan lada dan banteng

Dinas Kesehatan

- Terkait ODF kita ada form untuk verifikasi yang sudah terealisasi dimana baru 47 yang diverifikasi berdasarkan form sesuai dengan Kemendes. Rencana jika tidak ada halangan bulan Januari ini ada 10 desa yang sudah kita verifikasi ditrans Puskesmas tingkat kabupaten. Sehingga totalnya ada 57 yang diverifikasi.
- Sebenarnya yang sudah klaim ODF ada sekitar 82, tapi secara verifikasi baru 57
- Kita ada form untuk verifikasi pasar
- Team Puskesmas akan mengatur untuk form verifikasi pasar
- Di kesehatan, data-data sebagian sudah dilengkapi dan sudah bisa disampaikan ke forum

Perkim

- Istilah di kita namanya bukan bedah rumah tapi rumah tidak layak huni masuk poin 3 dan 10
- Kita akan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan dan pokja pemukiman
- Dari rumah layak huni ada 3837, sekarang sisa 2144

- Untuk kawasan kumuh sudah ada progress berkurang 448 dan kita akan membuat SK Kawasan Kumuh
- Untuk bedah rumah kami akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan DINSOS dan akan kita kompilasikan menjadi satu.

DLH

- Ada 4 dimensi yang terkait dengan DLH yaitu : udara bersih, pengelolaan sampah, teknis operasional pengelolaan sampah dan
- Dari semua 4 dimensi kami akan menyiapkan data-datanya
- Saran kami dari forum kota sehat ada kurun waktu yang ditentukan
- Kemudian ada semacam verifikasi data apa yg masih kurang dan harus dilengkapi

Dinas Ketahanan Pangan

- Kita akan mendukung kegiatan KKS dan mempersiapkan data-data yang akan diperlukan nantinya
- Dari dimensi ketahanan pangan dan gizi, ada 4 aspek/kriteria yaitu :
 1. Ketersediaan Pangan, daerah kita ada Perda No. 11 Tahun 2019. Untuk ketersediaan pangan di masyarakat tiap hari kita selalu melaporkan ketersediaan pangan ditingkat distributor kita kirim ke pusat juga.
 2. Lembaga Distribusi Pangan, kita ada kegiatan PPM yaitu Pengembangan Pangan Masyarakat, disana ada SK petani Indonesia untuk bisa mendukung
 3. Pola Harapan Pangan akan dipenuhi
 4. Keamanan Pangan Segar kami akan penuhi poin-poin yang akan disiapkan untuk mendukung kegiatan KKS.

Dinas Pendidikan

- Secara umum di tatanan pendidikan, sebelumnya kami sudah melakukan program ini pada dasarnya sekolah sudah mempersiapkan dan menciptakan sekolah ramah anak
- Dengan pandemi covid mereka sudah mempersiapkan diri dalam pelajaran didalam sekolah lebih spesifik lagi
- Pendidikan anak usia dini jauh-jauh hari beberapa tahun lalu pemerintah merencanakan untuk membentuk PAUD HI (Holistic Integrated) didalamnya semua aspek kesehatan dan gizi ada untuk pertumbuhan dan kembang anak
- Setiap sekolah pada dasarnya sudah memiliki Mou terkait dengan program imunisasi dan fasilitas kesehatan
- Kita akan upayakan beberapa sekolah sesuai protokol biarpun nanti new normal kembali agar kemajuan terpenuhi
- Terkait sekolah ramah anak, kita harus menggandeng DP3AP2KB. Karena mereka merupakan leading sektor dari sekolah ramah anak

- Ketentuan aspek perlu dicantumkan dan mulai diterapkan (pintu,kursi, jajanan yang sehat dll)untuk perkembangan pembangunan

III. PENUTUP

- Semua kriteria yang menjadi kewenangan perangkat daerah harus segera ditindaklanjuti
- Bulan depan harus dilakukan evaluasi dan verifikasi kriteria-kriteria yang belum bisa dipenuhi
- Mengkopilasi semua regulasi untuk diajukan ke pusat
- Triwulan I harus sudah selesai semua
- Yang mendukung kegiatan Kabupaten Kota Sehat dalam anggaran kas harus dipercepat. Sehingga Triwulan I harus bisa di implementasikan agar bisa bersinergi dengan apa yang dilakukan oleh forum.
- Adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kriteria Kota sehat

Pangkalan Bun, 06 Januari 2021

Notulis



Ika Farida Oktaviani, S.IP